

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap alternatif pemotongan PPh Pasal 21 memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya *take home pay*, biaya komersial, biaya fiskal, dan PPh terhutang perusahaan. Metode pemotongan PPh Pasal 21 yang paling menguntungkan adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 di *Gross up*, karena perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan sebagai unsur beban. Bagi karyawan tunjangan pajak tersebut dikenakan PPh Pasal 21.

Ditinjau dari segi komersial dan biaya fiskal, perusahaan akan menanggung selisih antara biaya komersial dan biaya fiskal yang jumlahnya tidak berbeda dengan alternatif pertama (PPh Pasal 21 ditanggung pegawai) dan alternatif ke tiga (PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan). Selisih antara biaya komersial dan biaya fiskal tampaknya seperti suatu pemborosan, hal ini harus diperhatikan bahwa akibat selisih biaya fiskal yang besar tersebut berdampak kepada laba sebelum pajak menjadi lebih kecil. Selanjutnya yang akan memberi pengaruh kepada pajak penghasilan terutang perusahaan menjadi lebih kecil. Dari sudut pandang karyawan, gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) karyawan adalah yang terbesar.

Jika dibandingkan dengan alternatif pertama yaitu PPh Pasal 21 yang ditanggung pegawai, yang selama ini digunakan oleh PT "X", terlihat bahwa

perusahaan menanggung selisih biaya komersial dan biaya fiskal yang jumlahnya sama dengan PPh Pasal 21 di *gross up*, selanjutnya pajak penghasilan terutang adalah yang terbesar. Dilihat dari sudut pandang karyawan, gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) karyawan adalah yang paling kecil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan perusahaan untuk menerapkan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang di *gross up* disbanding dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai. Hal ini dikarenakan metode di *gross up* lebih menguntungkan bagi perusahaan, baik dilihat dari segi selisih biaya komersial dan biaya fiskal maupun besarnya PPh terutang perusahaan.